Intervensi Amerika Serikat dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Yuda B. Tangkilisan

ABSTRACT *This research deals with the relation between Indonesia dan the United States of America (US) in the past. Recently the role of the US becomes stronger and dominant in the international scene. The US also interferes into the foreign policy making of a country, like Indonesia. The single super power, after the dismiss of the Uni-Sovyet following the end of the Cold War, imposed its will to Indonesia to take a part in a war against terrorism after the Tragedy 911. It seems that such a attitude is not something new happenng in this era. The intervention already occurred in the past. The US got involved and interferred the Indonesian struggle for independence. On the one hand the conduct could be seen as a blessing in disguise because it forced the Dutch to end its effort restoring a colonial rule. On the other, the US treated Indonesia not always friendly and sincerely. They pushed Indonesia to accept agreements with the Dutch to end the dispute.*

KATA KUNCI *Intervensi, perjuangan, kemerdekaan Indonesia, Amerika Serikat, Belanda.*

Beberapa tahun lalu, belum lepas dari ingatan kita, terjadi sebuah tragedi yang dikenal dengan "911" (September 11th), yang berupa peristiwa penyerangan terhadap beberapa gedung penting di Amerika Serikat (AS). Penyerangan terhadap gedung-gedung itu, yakni gedung kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon, membuka lembaran baru dalam sejarah dan kehidupan masyarakat AS. Betapa tidak, setelah melalui dua Perang Dunia dan sebuah Perang Dingin (*Cold War*) dengan keberhasilan mencegah merembesnya eksese destruktif perang ke dalam wilayahnya, secara tak terduga suatu malapetaka terjadi di dalam "rumah sendiri". Gedung WTC adalah pusat kegiatan ekonomi dan bisnis AS yang merangkul dunia, sedangkan Pentagon adalah pusat kendali kekuatan militernya dan dari sinilah intervensi militer AS ke berbagai belahan dunia dicanangkan. Dua tempat itu merupakan simbol soko guru supremasi AS di dunia internasional.

Berdasarkan pengalaman pahit itu, muncul suatu "perang" baru setelah berakhirnya Perang Dingin yang berlangsung hampir setengah abad, yang akhirnya menjadikan AS sebagai negara adidaya tunggal (*single*

superpower) – “perang” yang dicanangkan oleh Presiden Bush, Jr. sebagai perang terhadap terorisme. Kata *terorisme* menjadi populer dan diangkat ke jenjang internasional sebagai sebuah momok yang perlu ditakuti (diwaspadai) dan ditanggulangi. Padahal, tindakan teror bukan sesuatu yang baru karena dalam suatu perang bentuk teror juga menjadi bagian dalam kampanye mencapai kemenangan, misalnya dalam perang urat syaraf (*psy-war*). Secara parsial, tindakan teror, mulai dari bentuk penyanderaan hingga pembantaian telah berlangsung beberapa dekade lalu di beberapa negara. Peristiwa kejam yang terjadi di Olimpiade Muenchen terhadap atlet-atlet Israel dan dikenal dengan September Hitam (*Black September*) barangkali belum pupus dari ingatan. Atau, drama pembajakan dan penyanderaan pesawat Garuda Indonesia Airways (GIA dan kini menjadi Garuda Indonesia) di Bangkok mengingatkan kita pada suatu tindakan teror. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa itu tidak berkembang menjadi suatu “perang bersama” bahkan tidak pula untuk tingkat kawasan (*regional*).

Tragedi yang terjadi di dua kota AS dikampanyekan menjadi suatu “perang dunia”. Memang, apabila diruntut ke peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya, tindakan teror terhadap instalasi AS berlangsung di beberapa tempat (negara). Sejumlah korban jatuh dan tidak hanya warganegara AS namun juga penduduk negara lainnya. Korban bencana WTC juga meliputi warga berbagai negara, termasuk Indonesia, dan luar biasa dari segi jumlah. Dari sudut pandang itu, dengan sendirinya Tragedi 911 berdimensi internasional walaupun, dari aspek ekonomi, dampak ketenagakerjaan yang berarti dialami oleh penduduk New York yang banyak kehilangan nafkahnya. Kini berangsur-angsur kesulitan itu relatif telah berhasil diatasi.

Internasionalisasi “Tragedi 911” agar menjadi suatu “perang global terhadap terorisme” gencar dilancarkan oleh AS. Berbagai upaya, baik melalui jalur diplomasi maupun kerjasama ekonomi, ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Pada mulanya aksi teror itu sebenarnya hanya ditujukan kepada AS, sebagaimana berita mutakhir di sejumlah media massa yang menyiarkan seruan Osama bin Laden, tokoh yang dianggap menjadi “dalang” serangan 11 September itu dan pemimpin organisasi Al Qaeda. Bin Laden, yang masih diliputi misteri apakah masih hidup atau tidak, menyatakan bahwa untuk mengantisipasi rencana serangan AS ke Irak, ia mengingatkan AS akan makna serangan setahun yang lalu itu. Ia tegas-tegas menyatakan bahwa serangan itu adalah reaksi terhadap dominasi sewenang-wenang dan permusuhan yang AS lancarkan terhadap umat tertentu. Sampai di sini jelaslah “Tragedi 911”: walaupun korbannya dari berbagai latar belakang kebangsaan, dimensi pertikaianya tak lebih bersifat bilateral (dua pihak). Namun, bagi Indonesia, sejumlah peristiwa peledakan bom di berbagai tempat mengisyaratkan hadirnya aksi terorisme yang terkadang tujuan dan sasarannya tidak mudah untuk dipahami. Terlalu naif dan sepihak pula apabila dikatakan bahwa aksi terorisme di Indonesia berkaitan dengan pencapaian tujuan pihak AS dengan seruan

“perang global”-nya.

Mengangkat “Tragedi 911” sebagai masalah bersama tidak terlepas dengan peranan dan misi AS di dunia internasional. Sejak pasca-PD II AS melegitimasi peranannya sebagai polisi dunia, sebagai wujud intervensiisme alih-alih isolasionisme dari masalah-masalah dunia. AS aktif dalam kiprah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memasukkan pandangan dan kepentingannya sebagai agenda utama pembicaraan dan arah kebijakan badan dunia itu. Bersamaan dengan cengkramannya pada politik dunia, AS juga aktif dalam membangun ekonomi global. Kiprah ekonomi AS bermisikikan semangat kapitalisme liberal, yakni menciptakan suatu pasar bebas (*free market*). Pengaruhnya diperkuat hingga ke lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia, seperti IMF, WTO, dan World Bank. Jaringan pengaruh dan dominasi ekonomi AS pun mengukuhkannya sebagai adidaya tunggal sekaligus polisi dunia.

Selanjutnya, AS, yang tampaknya masih dalam rangka kampanye menciptakan musuh bersama dunia, memberikan keprihatinannya terhadap persoalan “terorisme” di dalam negeri negara-negara tertentu. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Untuk Indonesia, pertanyaannya adalah apakah bangsa ini akan terpicat dengan ajakan AS terjun ke dalam suatu “perang global” yang baru setelah jeda sementara dengan berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*). Sebagai tambahan, bagaimana Indonesia menyeimbangkan kepentingan nasional—karena Indonesia dalam Pembukaan UUD-nya memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan keamanan dunia—padahal, di bidang ekonomi Indonesia dalam taraf tertentu bergantung pada kerjasama dengan AS, baik secara bilateral maupun multilateral dan langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi, tentunya Indonesia bukannya tidak punya pilihan lain dan bukannya dalam suasana dilematis. Dalam hal itulah kearifan diperlukan untuk menentukan pilihan agar sikap dan keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Bertolak dari kenyataan tersebut, terlihat kualitas hubungan antara Indonesia dan AS. Hingga saat ini, entah sampai kapan di masa mendatang, hubungan keduanya masih berada dalam keadaan yang tidak seimbang: Indonesia dipandang sebagai mitra junior yang dapat diarahkan kemauan dan kebijakannya. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan kedua bangsa tidak pelak lagi relevan dan signifikan. Keadaan di masa kini memiliki jejak dan akar di masa lampau. Perkembangan di masa sebelumnya akan membentuk keadaan di masa setelahnya. Memahami masa lalu memerlukan kearifan dan keseksamaan agar tidak terjebak pada suatu lingkaran setan (*vicious circle*) persoalan yang serupa namun tidak sama sehingga menjadi kritis terhadap permasalahan.

KETERLIBATAN AS DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN RI

Pada tahun 2002 bertambah satu lagi karya mengenai keterlibatan AS dalam perjuangan kemerdekaan RI. Frances Gouda, yang dibantu oleh Thijs Brocades Zaalberg, menarik pokok bahasannya hingga awal abad

ke-20 ketika nasionalisme Indonesia mulai berkembang. Karya ini melengkapi karya-karya sebelumnya di seputar sejarah hubungan Indonesia dan AS, terutama mengenai periode 1945–1949 dalam historiografi Indonesia.

Beberapa karya yang diterbitkan sebelumnya antara lain adalah tulisan McMahon, Homan, Gardner, Oey Hong Lee, dan pasangan Kahin. Karya yang dikemukakan terakhir, walaupun pokok bahasan utamanya adalah mengenai keterlibatan dinas intelijen AS dalam suatu gejolak di Indonesia pada akhir tahun '50-an, menyajikan pula masa Revolusi Indonesia. Beberapa karya tersebut pada lingkup tertentu saling merujuk, namun tampaknya karya Oey tidak begitu dikenal dalam ruang diskusi itu – bahkan, malahan karya Gouda juga tidak mencantumkan tulisan Oey pada daftar acuannya.

Suatu kesamaan yang terdapat pada karya-karya tersebut adalah penelusuran dan pembahasan mengenai latar belakang – faktor-faktor yang mempengaruhi – dan proses keterlibatan AS dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan sendirinya, semua tulisan itu menempatkan keterlibatan AS sebagai faktor yang menentukan (*decisive factors*) dalam kemenangan Indonesia terhadap Belanda. Namun, pandangan seperti itu sulit dijumpai dalam penulisan sejarah Indonesia, yang Indonesiasentris. Dalam lingkup sentrisme Indonesia, faktor penjelasan terhadap keberhasilan Indonesia mematahkan kembalinya kolonialisme Belanda terletak pada kemampuan Indonesia sendiri, atau faktor Indonesia. Dalam penulisan sejarah Indonesia masa Revolusi Kemerdekaan, terdapat suatu perdebatan antara *bertempur* dan *berunding* atau *perjuangan bersenjata* dan *diplomasi*.

Pandangan kalangan pejuang di bidang bersenjata menyatakan bahwa perlawanan bersenjata Indonesia, tentara dan laskar, merupakan faktor yang menentukan dalam mengalahkan Belanda. Sementara itu, kalangan pejuang diplomat memandang bahwa pengakuan kedaulatan RI diperoleh melalui perundingan. Berbagai argumen dan fakta dikemukakan berkenaan dengan kedua pandangan tersebut. Bagaimanapun, kehendak merdeka merupakan pengikat kedua bentuk perjuangan tersebut. Dalam lingkup itu, pada khazanah historiografi Revolusi Indonesia, peranan pihak asing adalah faktor penunjang untuk kemerdekaan RI. Tampaknya pemahaman semacam ini tidak mudah lagi untuk dipertahankan di tengah-tengah perkembangan mutakhir dalam dan luar negeri RI.

Kemerdekaan Timor Timur, yang menjadi *Timor Leste*, memperlihatkan betapa pentingnya dukungan kalangan internasional, terutama PBB. Sulit dibayangkan dan diterima akal apabila kemerdekaan Timor Leste hanya mengandalkan perjuangan bersenjata. Memang, faktor Portugal memperlihatkan sumbangsih yang penting. Namun, langkah yang menentukan dalam pertarungan di bidang diplomasi dengan Indonesia adalah sikap AS. Pada awalnya AS tidak menentang, jikalau tidak dapat dikatakan mendukung, ketika Indonesia mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayahnya sebagai solusi terhadap kekacauan yang muncul

setelah Portugal meninggalkannya. Kemudian AS memprakarsai pembicaraan antara pihak yang bertikai, yang diiringi dengan desakan dan tekanan atas Indonesia, berujung pada suatu tawaran untuk menentukan nasib sendiri dalam bentuk referendum.

Jelaslah bahwa dukungan internasional, dan terutama AS, tidak dapat dikesampingkan dalam proses politik suatu bangsa di dunia dewasa ini. Tampaknya, situasi yang tak jauh berbeda berlaku pula surut ke belakang ketika Perang Dunia Kedua (PD II) usai dan proses dekolonisasi sejumlah wilayah berlangsung. Dengan itu pula pengkajian tentang keterlibatan AS dalam proses itu di Indonesia mendapati landasan berpijak yang mantap secara ilmiah, aktual, dan faktual.

Keterlibatan AS dalam perjuangan kemerdekaan RI memiliki lingkup politik dan ekonomi. Pada lingkaran politik, ketika itu AS adalah pemenang perang yang segera meluncur ke ajang pertarungan berikutnya. Tidak beberapa lama berlangsungnya PD II, dunia memasuki suatu masa Perang Dingin yang menampilkan konflik antara paham kapitalis-liberalisme dan komunisme. Peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia berada pada masa awal konflik global itu. Tentunya jalin menjalin dengan perkembangan dalam negerinya, keterlibatan AS menampakkan kepentingan politiknya. Sejalan dengan itu, investasi dan kegiatan bisnis di daerah yang sedang bertikai itu membentuk motivasi ekonomi AS dalam keterlibatan tersebut, yang sedianya berada di pihak Belanda.

Kemudian, kedua faktor itu berproses sedemikian rupa yang tampil dalam sikap dan pandangan pejabat-pejabat AS yang berwenang dan memiliki perhatian terhadap masalah Indonesia. Dalam pandangan AS pertikaian Indonesia dan Belanda ketika itu disebut sebagai *masalah Indonesia (Indonesian question)*. Suatu interaksi antara perkembangan yang muncul di seputar konflik itu dan kepentingan AS terjadi sehingga menghasilkan sikap yang menentukan. Perubahan sikap hingga menjadi mendukung perjuangan RI melanda kalangan politik AS. Pokok-pokok bahasan itulah yang dijelaskan dalam tulisan ini.

Landasan pembahasan lainnya yang tidak kurang pentingnya dalam penelitian ini adalah suatu dokumen yang bertajuk "Keterangan Menteri Luar Negeri Acheson tentang Kemerdekaan Indonesia" dan bertanggal 3 November 1949. Dalam dokumen itu tertera latar belakang dukungan AS terhadap kemerdekaan Indonesia sebagai hasil suatu perundingan yang dimediasi oleh AS. Dokumen itu mengungkapkan alasan (latar belakang), pemahaman dan kehendak AS terhadap hasil perundingan itu, yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (KMB). Berdasarkan keterangan itu, proses perubahan sikap AS dalam masalah Indonesia ditinjau dan ditelaah.

Dalam tulisan ini suatu sudut pandang yang berbeda diajukan, yaitu suatu pengertian "intervensi". Dalam kajian tentang imperialisme, pengertian itu sudah lazim dikemukakan dan tulisan pendahuluan mengenai masalah ini telah memperlihatkan tanda-tanda bahwa AS melancarkan tindakan itu dalam masalah Indonesia (Tangkilisan 2002). Bentuk intervensi itu antara lain adalah pemaksaan kehendak (*to impose a*

will), yang dalam tulisan James W. Gould (1972) dikategorikan sebagai perwujudan tindakan imperialistik. Untuk itu, permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dibingkai dalam suatu sudut pandang bahwa keterlibatan AS adalah suatu intervensi walaupun di satu sisi merupakan "rahmat yang tersembunyi", yaitu sebagai "katalisator" dalam mempercepat perjuangan Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. "Katalisator" yang dimaksud, seperti yang dikatakan oleh Pierre van der Eng (1988), adalah bantuan (rencana) Marshall – baik sikap maupun tindakan intervensi kental mewarnai keterlibatan itu. Di masa selanjutnya, warna intervensi itu sangat transparan dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, baik secara bilateral maupun multilateral.

Tulisan ini merupakan hasil sebuah penelitian ilmu sejarah. Perangkat ilmiah yang digunakan adalah metode sejarah. Perkembangan pemikiran di seputar metode sejarah telah menghasilkan sejumlah prosedur penelitian yang tertuang dalam beberapa tahap. Namun, di tengah-tengah berbagai pendekatan itu secara konvensional disepakati bahwa setidaknya terdapat tiga tahap dalam metode sejarah, mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan suatu proses penulisan (historiografi), sebagaimana yang diajukan Gottschalk (1975).

Penelusuran sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan tahap heuristik. Perpustakaan adalah sasaran yang dituju ketika melakukan tahap itu. Sejumlah perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI), Kajian Wilayah Amerika (KWA) UI, dan CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*) adalah tempat penyimpanan sumber-sumber yang diperlukan.

Kritik ekstern relatif tidak banyak menyita waktu oleh karena sebagian besar sumber berupa sumber sekunder. Di semua perpustakaan tersebut sumber ditemukan dalam bentuk aslinya, bukan duplikasi berupa fotokopi atau mikrofilm dan sejenisnya. Di pihak lain, dokumen yang dimanfaatkan berasal dari publikasi kumpulan sumber, tidak dalam bentuk aslinya dan telah diterjemahkan. Pada karya suntingan dan kompilasi William Bradley dan Mochtar Lubis (1991) tercantum sebuah dokumen mengenai Keterangan Menteri Luar Negeri Acheson tentang Kemerdekaan Indonesia tertanggal 3 November 1949, yang dapat dikategorikan sebagai sumber primer. Dari dokumen itu dapat diketahui sikap dan pernyataan resmi pemerintah AS. Dokumen itu menjadi penting ketika dihadapkan pada karya-karya sebelumnya yang memperlihatkan suatu perkembangan yang bersifat perubahan.

Pada kritik intern, penelusuran pembacaan menggiring ke arah suatu perbandingan di tengah-tengah perbedaan cara penyajian keterangan (fakta) yang hampir sama secara keseluruhan. Beberapa sumber memanfaatkan sumber yang berbeda. Keadaan yang berbeda itu justru dapat disinergikan sehingga saling melengkapi (komplementasi) antara satu dan lainnya.

Prinsip dalam penelitian sejarah, sebagaimana yang ketentuan dalam metode sejarah, adalah penggunaan sumber primer. Kebaruan sebuah hasil

penelitian sejarah berkaitan erat dengan penggunaan sumber tersebut, terlebih jika pokok bahasan itu relatif jarang disoroti namun memiliki arti penting dalam perkembangan sosial dan budaya suatu masyarakat. Kebenaran suatu peristiwa pertama-tama merujuk pada ketersediaan sumber primer. Langkah berikutnya tinggallah pengujian kandungannya (kritik intern).

Bagaimanapun, terdapat banyak peristiwa di masa lalu yang belum tersentuh sehingga penelusuran sumber primernya belum tuntas. Sehubungan dengan itu, terkadang pencarian sumber terbatas pada kategori sumber sekunder. Memang derajat kekritisian hasil penelitian akhirnya tidak sebanding jikalau memanfaatkan sumber primer. Selain itu, tak jarang pula suatu permasalahan dalam kadar tertentu telah banyak diperbincangkan dan dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga ketersediaan sumber primernya seyogianya tidak menjadi kendala. Namun, karena satu dan lain hal, muncul masalah sumber. Persoalan utamanya, secara umum, adalah keterbatasan akses dan sarana untuk menjangkau sumber primer tersebut. Oleh sebab itu, pengkajian masalah akhirnya memanfaatkan sumber sekunder.

Dalam tulisan ini dimanfaatkan hasil penelitian seperti oleh Kahin (1952), McMahon (1981), Kahin dan Kahin (1995), Gardner (1997) dan F. Gouda (2002). Karya Kahin adalah suatu karya klasik yang tetap menjadi acuan dalam penulisan sejarah tentang Revolusi Indonesia. Kahin tidak hanya menulis, namun juga menjadi saksi langsung jalannya Revolusi Indonesia. Oleh karena itu, sumbernya langsung dari para pemimpin Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang melibatkan AS tidak luput dari goresan penanya. Sebagai ancang-ancang dan rujukan utama, karya Kahin itu belum tergantikan oleh lainnya.

Karya McMahon dapat digolongkan sebagai Sejarah Diplomasi yang didasarkan pada suatu tinjauan lengkap terhadap dokumen berbahasa Inggris yang tersedia di AS dan Inggris. Ia menempatkan hubungan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan keterlibatan AS dalam lingkup Perang Dingin. Di kalangan pengamat sejarah hubungan Indonesia dan AS pada kurun waktu Revolusi Indonesia, karya ini sering menjadi rujukan utama. Sebagaimana karya Kahin, tulisan McMahon belum menjangkau sumber-sumber seperti memoar, catatan harian, surat pribadi, dan otobiografi.

Kesenjangan itu dijembatani oleh karya Gardner. Ia, yang sempat menjadi duta besar untuk RI, memiliki banyak kesempatan untuk menjangkau sumber semacam itu. Pengalaman tugasnya yang cukup lama untuk Indonesia menjalin suatu hubungan pribadi tertentu dengan sejumlah tokoh Indonesia. Oleh karena itu, banyak kenangan, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh sehubungan dengan penyusunan karyanya yang batas waktunya merentang selama 50 tahun—karya itu memang merupakan peringatan 50 tahun hubungan Indonesia dan AS. Banyak informasi baru dan segar disajikan Gardner dalam karyanya itu. Namun

tentunya perhatian utamanya adalah pada masa-masa tugasnya yang kebanyakan di masa Orde Baru.

Sebagai latar belakang, Gardner menyoroti masa kolonialisme Belanda dan periode Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Suatu upaya studi yang mendalam dilakukannya untuk menyibak dimensi hubungan Indonesia dan AS pada masa itu, yang sangat menarik dan penuh dengan fakta baru. Sikap AS yang terpantul langsung dari insan-insannya yang berinteraksi dan hadir di kancah peristiwa terungkap jelas dalam bahasanya sehingga memberikan kredibilitas tertentu terhadap karyanya itu. Sumbangsih Gardner dalam menyibak peran AS dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sungguh-sungguh tak ternilai.

Sumber lainnya adalah karya Kahin dan Kahin mengenai keterlibatan dinas rahasia AS CIA (*Central Intelligence Agency*) dalam pemberontakan di Indonesia. Pada akhir tahun 50-an berlangsung pemberontakan PRRI Permesta. Dinas rahasia AS itu memainkan peran di belakang layar mendukung pemberontakan tersebut. Sebagai latar belakang hubungan Indonesia dan AS, periode Revolusi Kemerdekaan Indonesia menjadi pembukaan perbincangan menuju pokok bahasan utama. Beberapa keterangan menarik sehubungan sikap AS terhadap Indonesia terangkum dalam bagian itu.

Sementara itu, karya Gouda adalah sebuah terbitan mutakhir berangka tahun 2002. Perhatiannya tertuju pada perkembangan nasionalisme Indonesia dan AS. Cakupan periodenya adalah sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1950. Tampaknya Gouda menempatkan dukungan internasional yang berperan besar dalam perubahan politik berupa dekolonisasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Salah satu kelebihan karyanya adalah mulai dimasukkannya peran pendapat umum AS dalam mengarahkan kebijakan luar negeri Washington terhadap Indonesia. Tidak hanya itu, prestasi yang lain adalah upaya penelusuran hubungan Indonesia dan AS pada masa paruh awal abad ke-20 sebelum pecahnya Perang Pasifik. Perkembangan nasionalisme Indonesia di masa kolonialisme Belanda memperoleh perhatian tertentu dari kalangan AS.

Gouda menggunakan banyak sumber yang relatif baru, namun tampaknya ia tidak menyentuh karya Oey Hong Lee. Padahal, karya itu merupakan hasil jerih payah pemelajaran dan penggunaan sumber-sumber resmi diplomatik AS, yang berupa terbitan Departemen Luar Negerinya (Deparlu). Sehubungan dengan itu, sangat menantang apabila sumber-sumber itu diperbandingkan untuk saling komplementasi, termasuk juga sumber lainnya, dalam upaya menuju suatu dataran pemahaman baru di seputar perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia dan AS.

MENGAPA KEMERDEKAAN

Kemerdekaan bagaikan sebuah kata keramat dan mengandung janji surga yang tengah membius kelompok-kelompok masyarakat di dunia dewasa ini. *Kemerdekaan* seolah-olah merupakan kata kunci yang tidak dapat ditawar-tawar lagi menuju suatu alam kebebasan dan kemakmuran. Di

alam modern, kemerdekaan berlomba dengan dorongan kapitalisme yang melahirkan suatu sistem sosial anti-kemerdekaan. Kapitalisme membawa kekuatan Barat ke dunia Timur (Asia dan Afrika) untuk merampas kemerdekaan mereka. Ketika cakrawala dunia modern menguak, pelayaran bangsa Barat memasuki kawasan perairan Afrika dan Asia. Monopoli yang ditulangnya kekuatan militer mencengkrum masyarakat setempat. Jaringan emporium merosot menjadi suatu kesatuan imperium. Eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam dan manusia pun berkembang tak terkendali dalam kemegahan sebuah imperium (Kartodirdjo 1987).

Ketika itulah, kemerdekaan seakan-akan menjadi asing dan jauh menggantung di atas sana, sulit untuk diraih. Alam kemerdekaan seolah-olah mengutub dan dipisahkan oleh tembok kekuasaan imperium. Seraya itu pula jaringan imperialisme dan kolonialisme, sebagai pasangan dekatnya, membelenggu dan mengharamkan harapan dan gagasan sebuah kemerdekaan. Harga sebuah kemerdekaan pun menjadi mahal. Keinginan untuk merdeka menuntut pengorbanan besar, harta, raga, dan jiwa. Perlawanan dilancarkan untuk memperoleh kembali kemerdekaan. Sebagian besar dari mereka tertundukkan. Namun, walaupun harus kalah, berkali-kali perlawanan-perlawanan itu membentuk mosaik rantai alur mengalirnya makna sebuah kemerdekaan. Di dalam jiwa perlawanan itu, apa pun hasil akhirnya, hiduplah semangat sebuah kemerdekaan.

Itulah kesaktian kemerdekaan. Ia tidak lebih dari sebuah gagasan, atau suatu cita-cita, namun akibat yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Keinginan untuk merdeka mampu menggerakkan suatu kelompok masyarakat yang paling lemah dan tak berdaya sekalipun untuk angkat senjata. Kerinduan kemerdekaan menggerakkan tangan-tangan mungil untuk berintifadah terhadap tentara Israel yang berperalatan modern lengkap. Semangat kemerdekaan juga membawa seorang ibu rumah tangga terjun ke wawasan publik untuk berpolitik dan hendak membebaskan bangsanya dari belenggu kekuasaan totaliter.

Kemerdekaan tidak hanya hidup di alam gagasan (dunia ide). Gagasan kemerdekaan pada derajat tertentu menyejarah ketika ia membentuk jalinan antargenerasi. Gagasan kemerdekaan mengalir dalam untaian waktu. Gagasan kemerdekaan pada masa lalu menjelma menjadi ilham pada masa selanjutnya tanpa kehilangan daya dan keampuhannya. Setiap generasi mencerna makna kehidupan zaman, namun esensi sebuah kemerdekaan tinggal tetap. Bebas di dalam belenggu penjara, sebagaimana Thoureau merupakan perlambang upaya manusia untuk mencari dataran kemerdekaan. Selayaknya sebuah gagasan, apalagi sebuah cita-cita, kemerdekaan tidak selalu dapat diwujudkan sepenuh dan seutuhnya. Oleh karena itulah, tidak jarang seseorang telah cukup puas apabila telah dapat menikmati kemerdekaan di alam pikirannya.

Kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa justru alam kehidupan yang merdeka berutang banyak pada kehendak untuk merdeka dalam berpikir. Pada Abad Pertengahan dalam episode sejarah Eropa, alam pikiran masyarakatnya hanya tertuju pada suatu kepercayaan yang dianut dan

ditentukan oleh pemuka agamanya. Kemerdekaan untuk berpikir dan menggunakan akal budi menjadi picu suatu perubahan masyarakat. Pada puncaknya, keinginan itu mengguncangkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, yang diawali dari pembebasan menggunakan akal budi, hingga menggiring dunia Eropa memasuki dunia modern. Setelah itu, Eropa muncul sebagai palungan dari munculnya negara-negara bangsa (*nation-state*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan (Kennedy 1989).

Kembali ke perkembangan pada masa kini, keinginan untuk merdeka tetap menggejala. Contoh mutakhir menunjukkan bahwa setelah runtuhnya suatu negara perserikatan Uni Sovyet, dalam suatu pertarungan yang panjang dengan Perang Dingin (*Cold War*), negara-negara bagiannya banyak yang memproklamasikan kemerdekaannya. Demikian pula dengan negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari Yugoslavia. Biaya yang harus ditebus untuk kemerdekaan sedemikian tak ternilai, hampir menelan satu generasi.

Apakah bagaikan sebuah kutukan, atau permainan kartu domino, perkembangan yang sedang berlangsung di Indonesia akan menuju pada kenyataan seperti itu adalah sebuah problema yang sedang marak dibahas dewasa ini. Pascalangser Soeharto, seiring dengan krisis ekonomi akhir dekade 90-an lalu, Indonesia menghadapi masalah pelik dengan munculnya bayang-bayang perpecahan. Keinginan untuk memisahkan diri yang kian marak saat ini berakar ke masa silam. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah contoh-contoh gerakan separatis yang hendak merdeka di luar kedaulatan Indonesia dan telah muncul sejak tahun 1960-an.

Suatu hal yang sangat menarik untuk mencoba menelusuri dan memahami mengapa muncul kehendak untuk merdeka di luar format Republik Indonesia. Apakah alam kemerdekaan yang telah diakui oleh dunia internasional sebagaimana sandangan kedaulatan RI tidak dipahami sebagaimana mestinya sehingga harus digagas ulang arti sebuah kemerdekaan adalah pertanyaan yang sering menggelitik untuk dipuaskan dengan sebuah jawaban. Permasalahan itu tidaklah sederhana, bahkan demikian pelik dan rumit sehingga tidak akan segera tuntas dalam rentangan waktu yang singkat.

Akan tetapi, jika persoalan itu didekati secara arif dengan mempertimbangkan kemerdekaan sebuah kehendak, atau ketidaktertundukannya sebuah cita-cita, akan tampak bahwa suatu pemahaman yang bijak akan muncul. Maksudnya adalah mulailah dengan membandingkan kehendak akan kemerdekaan di dekade-dekade paruh pertama abad ke-20. Bukankah pihak kolonial, sebagaimana juga sebenarnya kesepakatan akhir KMB, menawarkan sebuah format kemerdekaan, yang pada awalnya diterima untuk ditolak dan memunculkan sebuah Republik Kesatuan yang berbeda, kepada para pejuang Indonesia. Namun, kehendak para pejuang Indonesia akan kemerdekaan keluar sebagai pemenang. Di satu sisi dapat dikatakan bahwa format kemerdekaan tawaran Belanda itu tidak sesuai dengan alam pikiran dan keinginan mereka.

KEMERDEKAAN DAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Walaupun dalam beberapa piagam, dalam deklarasi dan preambulnya, terselip suatu pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak dan milik semua bangsa, atau bahkan dinyatakan bahwa semua manusia sederajat, kemerdekaan bukanlah "sesuatu yang jatuh dari langit". Kemerdekaan itu harus direbut dan diperjuangkan. Oleh karena itu, tidak ternilailah harga sebuah kemerdekaan.

Dalam kehidupan antarbangsa, perjuangan kemerdekaan memiliki tata aturan. Tidak dapat diterima apabila suatu komunitas menyatakan kemerdekaannya tanpa memenuhi prasyarat tertentu. Komunitas "merdeka" itu tidak akan memperoleh tempat dalam tata pergaulan antarbangsa. Bahkan, berdasarkan dukungan dunia internasional suatu pemerintahan "berhak" untuk menggunakan kekerasan, bahkan menumpas, suatu kelompok yang hendak memerdekakan diri dalam wilayah yurisdiksinya.

Teori politik klasik menyatakan syarat berdirinya suatu bangsa, selain wilayah, penduduk, dan pemerintah yang sah, juga adalah pengakuan asing. Di masa kini pengakuan itu dapat datang, baik dari secara langsung maupun melalui lembaga internasional, PBB. Dukungan PBB melalui Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanannya sangat penting dalam menegakkan kedaulatan suatu bangsa. Walaupun telah dikemukakan sebelumnya bahwa peranan AS sangat mewarnai kebijakan PBB. Di forum itulah permasalahan dunia diperbincangkan dengan segala sudut pandang termasuk kepentingan setiap negara anggota.

Dukungan internasional tentunya bukanlah bagaikan udara yang dengan bebas dapat dihirup, tidaklah diperoleh dengan serta-merta ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Banyak deklarasi kemerdekaan yang tidak mendapat tanggapan dunia internasional. Biasanya gerakan separatisme dari suatu pemerintahan yang legitimatif tidak mudah memperoleh dukungan internasional. Aspirasi kebebasan suatu kelompok masyarakat memerlukan pertimbangan tertentu. Memang dalam lingkup ini tidak jarang terjadi suatu pembantaian (*massacre*) terhadap suatu kelompok (etnis) tertentu yang menghendaki kemerdekaan sendiri.

Sejarah terbentuknya negara-negara merdeka dewasa ini memperlihatkan bahwa faktor kolonialisme (terutama Barat) sangat berperan. Sebelum kedatangan kekuatan penjajah Barat, kawasan Asia dan Afrika (sebagai sasaran utamanya) terbagi atas komunitas-komunitas politik (*polities* atau *political entities*) yang berdiri sendiri, mulai dari bentuk *tribes* hingga kerajaan (*kingdom*). Pada umumnya di dalam komunitas itu suatu identitas etnik sangat menonjol (dominan). Mayoritas dalam jumlah berarti dominasi dalam politik. Dengan itu, walaupun pada beberapa kerajaan umumnya, identitas etniknya majemuk, kekuasaan berada pada kelompok etnik yang mayoritas. Bukanlah tidak pernah penaklukan dalam rangka meluaskan pengaruh dan kekuasaan suatu entitas politik membawa serta pembantaian suatu kelompok etnis, yang hendak ditundukkan. Ketika

itu, belum ada kalangan internasional yang berkemampuan membatasi dan mengawasi tindak-tanduk sebuah kekuasaan.

Keberlangsungan kenyataan politik dengan etnik dominan itu tersendat dengan kehadiran kekuatan kolonialisme Barat. Dengan keunggulan yang dimiliki, mereka merambah dunia Timur dan membangun sebuah imperium baru. Komunitas politik yang mereka bentuk umumnya majemuk dan dengan otoritas yang dimiliki dominasi suatu kelompok etnik setempat muncul sebagai mitra penyelenggaraan kekuasaan. Tidak jarang kelompok etnik yang muncul itu bukanlah sesuatu yang mayoritas, melainkan mungkin kelompok yang sedianya justru tidak pernah memegang peranan politik utama. Atmosfer kekuasaan kolonial menciptakan keseimbangan politik antaretnik yang semu. Kalaupun terdapat suatu *rust en orde* (ketertiban dan ketenteraman) yang antara lain membias dalam hubungan antaretnik, semuanya itu bersifat sementara karena berlandaskan suatu cengkraman kolonial yang didukung oleh kekuatan bersenjata.

Ketika sendi kekuatan kolonial goyah, keseimbangan dalam hubungan antaretnik pun tidak lagi mampu bertahan. Apalagi guliran revolusi, sebagai bentuk adanya suatu perubahan sosial dan politik, memupuskan semua hukum, aturan, toleransi, dan bahkan moralitas. Pada umumnya komunitas politik atau negara yang muncul dari reruntuhan kolonialisme adalah komunitas yang tidak sama lagi dengan sebelum kedatangan kolonialisme. Kolonialisme telah "memaksa" kerajaan atau *tribes* yang sebelumnya bermusuhan untuk hidup bersanding secara damai. Untuk itu, sebenarnya negara-negara baru yang melepaskan belenggu kolonialismenya memerlukan perekat baru yang tidak hanya bertumpu pada kekuasaan belaka (Siregar 2000).

Dengan kenyataan sejarah seperti itu tampaklah bahwa kemerdekaan sebuah bangsa yang berasal dari dobrakan terhadap kolonialisme masih menyisakan masalah lain. Dalam perjuangan untuk merdeka, dukungan internasional tidak mudah diperoleh. Masyarakat internasional pasca-PD II masih didominasi oleh negara-negara Eropa yang justru adalah pelaku kolonialisme dan imperialisme. Keinginan akan restorasi kekuasaan kolonialisme mereka setelah diporak-porandakan Jerman di Afrika dan Jepang di Asia sangat kuat muncul ke permukaan. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa-bangsa baru yang hendak melepaskan diri dari jeratan kolonial itu (Sabir 1987).

Ketika itu, dukungan internasional banyak datang dari negara-negara yang bersimpati kepada mereka. AS adalah salah satu dan yang utamanya. AS sebagai pemenang dalam Perang Pasifik dipandang sebagai bangsa pembebas. Apalagi semangat antikolonialisme AS sangat menonjol berdasarkan pengalamannya melepaskan diri dari penjajahan Inggris. AS adalah bangsa modern pertama yang merdeka. Dengan prakarsa AS, dukungan internasional mengalir terhadap bangsa-bangsa yang hendak merdeka itu. Satu demi satu muncul negara-negara baru di dunia internasional.

Masalah lain yang harus diatasi setelah memperoleh kemerdekaan adalah menciptakan persatuan dan kesatuan. Dalam lingkup itu tidak jarang dunia internasional juga ikut bermain dengan campur tangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara. Tengoklah misalnya bagaimana AS, terutama dinas rahasianya, turut terlibat dalam pergolakan PRRI/Permesta di Indonesia. Demikian pula, bagaimana Uni Sovyet terlibat dalam pertarungan kekuasaan di sejumlah negara. Perang Dingin menciptakan kancah perang yang baru di halaman negara-negara, terutama yang baru merdeka, yang sedang menghadapi persoalan integrasi. Perang Dingin pula yang membelah dunia internasional dalam dua kutub yang berbeda walaupun di tengah-tengahnya terdapat suatu gerakan penengah yang nonblok—dengan Indonesia yang termasuk salah satu negara pemrakarsa dan motor gerakan itu.

INTERNASIONALISASI PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidaklah lepas dari situasi dan kondisi internasional. Ketika itu dunia sedang dilanda oleh kecamuk PD II di Eropa dan Afrika serta Perang Pasifik di kawasan Asia-Pasifik. Di kawasan yang disebutkan terakhir perang berlangsung antara Sekutu, dalam hal ini AS, dan Jepang. Serangan terhadap pangkalan armada laut AS di Pearl Harbour, Hawaii, pada tanggal 8 Desember 1941 menurut penanggalan setempat memulai pertarungan itu. Mengantisipasi perkembangan perang yang perlahan-lahan mulai menyudutkannya, Jepang mulai menggalang dukungan daerah-daerah yang didudukinya, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberi janji kemerdekaan.

Menanggapi janji itu, pihak Indonesia melakukan persiapan yang diperlukan di bawah pengawasan pihak Jepang. Suatu Badan Persiapan dibentuk dan perangkat-perangkat landasan idiil sebuah negara yang akan merdeka diperbincangkan. Berbagai pemikiran tentang kerangka idiil itu dibahas untuk menjadi sebuah konsep kehidupan bernegara. Selanjutnya, perkembangan perang menjadi katalisator yang mengubah situasi, hingga mempercepat ke arah kemerdekaan yang dijanjikan. Jepang kalah perang.

Kegagalan dan ketidakpastian melanda berbagai kalangan terutama para elite politik dan pemuda. Berita kekalahan itu bocor ke kalangan pemuda yang menimbulkan semangat dan gagasan untuk segera merdeka. Keadaan yang berbeda berkembang di kalangan elite politik (kelompok tua) yang lebih berdasarkan pengambilan keputusan pada perhitungan strategi yang memerlukan waktu untuk diwujudkan (Hadisoewito 1993). Walaupun kedua kelompok itu berbeda pandangan dan strategi, kehendak untuk merdeka tetap mempersatukan mereka. Ujung kesamaan itu berbuah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebuah proklamasi bukanlah tujuan akhir. Tidak sebagaimana sebuah sandiwara atau tayangan audio-visual yang biasanya berakhir dengan

kebahagiaan, proklamasi merupakan suatu langkah awal menyusuri sebuah jalan yang diharapkan membawa ke cita-cita yang dibangun semula. Kemudian, sebuah proklamasi yang berupa untaian kata membawa suatu perubahan besar, yakni Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Menyusul kumandang kemerdekaan itu, berbagai aksi dilancarkan dan reaksi bermunculan. Di tengah-tengah aksi yang tak jarang dibalut suatu euphoria, hadir kekuatan asing. Jepang adalah kekuatan asing pertama yang berada di tengah-tengah arus aksi itu. Kekuatan asing lainnya adalah Inggris yang mewakili otoritas Sekutu untuk melucuti Jepang. Kedatangan pasukan Inggris diboncengi oleh Belanda, yang hendak memulihkan kembali hegemoni kolonialnya di Indonesia (*Aspek-aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949*).

Ketika itulah persoalan internasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bermula, seiring dengan perjuangan diplomasi Indonesia memperoleh pengakuan dari bangsa-bangsa lain. Indonesia kemudian terlibat konflik dengan Belanda yang selanjutnya menyeret perantara Inggris. Sampai pada batas tertentu, Inggris berupaya hanya menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya hingga keadaan mengubah sikapnya untuk membantu Belanda menancapkan kembali cengkraman kolonialnya. Inggris dalam peranannya sebagai penengah dalam perselisihan itu leboh condong kepada Belanda. Dalam pada itu Indonesia harus berupaya untuk mencari keseimbangan kekuatan dalam perundingan dan diplomasi. Salah satunya adalah menggalang dukungan kalangan internasional dalam menghadapi Belanda. Wujudnya adalah menarik uluran tangan dari AS di tengah-tengah terbatasnya pilihan kondisi yang membelenggu.

KILAS BALIK HUBUNGAN INDONESIA (HINDIA BELANDA) DAN AS

Menurut Homan (1997), kebijakan AS terhadap konflik Indonesia dan Belanda berjalan dalam tiga tahap. Dari tahun 1945 sampai musim panas (pertengahan tahun) 1947 AS hampir-hampir tidak tertarik atau merasa berkepentingan dan menyerahkan sepenuhnya konflik itu kepada Inggris. Namun, sikap AS yang tampak adalah berada di pihak Belanda. Kemudian, pada masa akhir tahun 1947 – awal 1948 AS mengambil peran sebagai perantara (mediator), namun tetap berpaling ke Belanda. Sejak pertengahan tahun 1948 hingga akhir 1949 AS menampakkan sikap menekan Belanda yang berakibat mempercepat pengakuan kedaulatan terhadap RI.

Berdasarkan pandangan tersebut, tampak suatu proses perubahan pada sikap AS terhadap perseteruan Indonesia dan Belanda. Lebih terinci lagi perubahan itu menyangkut sikap AS terhadap Indonesia. Tidak banyak keterangan yang diketahui oleh kalangan pemerintahan AS tentang Indonesia. Pada masa sebelum PD II, AS mengenalnya sebagai suatu daerah jajahan Belanda, dengan nama *Hindia Belanda*. Merujuk ke masa-masa sebelumnya, sejumlah jalinan hubungan berlangsung antara AS dan Kepulauan Indonesia.

Beberapa peristiwa dan kasus dapat disebutkan berkaitan dengan persentuhan itu, seperti persinggahan konsul jenderal AS untuk Kanton di

Batavia pada 1784, jaringan perdagangan Rhode Island dan Batavia 1799–1836, peristiwa Kuala Batu 1832 dan 1838, Kasus Walter Murray Gibson 1854 di Jambi, permintaan bantuan Kerajaan Aceh pada tahun 1872, eksplorasi minyak AS di Pulau Sumatera pada akhir abad ke-19, persaingan komoditas tembakau pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan Sengketa Pulau Miangas atau Palmas di dekade awal abad ke-20. Tampaknya Kepulauan Indonesia hanya memiliki arti tertentu untuk AS. Secara politis, AS tidak banyak berkepentingan dengan pelaksanaan politik penjajahan Belanda walaupun perlakuan kolonial itu dipandang lebih baik daripada di jajahan negara Eropa lainnya. Pada tingkatan tertentu kepentingan ekonomi menarik perhatian AS terhadap Kepulauan Indonesia, terutama eksplorasi minyak bumi dan persaingan komoditas tembakau.

Ketika Perang Pasifik meletus, hampir-hampir tidak ada pembelaan AS terhadap Hindia Belanda. Dengan mudahnya jajahan Belanda di Asia Tenggara itu jatuh ke tangan Jepang. Keterlibatan AS yang nyata adalah dalam evakuasi penduduk keturunan Eropa ke Australia melalui Pelabuhan Cilacap. Bahkan, Balikpapan di Kalimantan Timur, yang menjadi penghasil minyak bumi, tidak cukup berdaya dalam menarik pembelaan AS terhadap serbuan Jepang di daerah jajahan sekutunya. Setelah memenangi perang, AS menyerahkan pemulihan di Kepulauan Indonesia kepada pihak Inggris setelah melalui perdebatan kecil internal.

Selanjutnya, menurut Homan (1997), keberpihakan AS terhadap Belanda berkaitan dengan perkembangan pada masa sebelum dan semasa PD II. Oleh karena banyak tidak tahu, AS berpandangan positif terhadap kolonialisme Belanda di Kepulauan Indonesia. Kebijakan kolonial Belanda dianggap lebih maju dengan stabilitas dan kesejahteraan yang dibuatnya. Berkaitan dengan pandangan anti-penjajahan AS, ternyata terhadap kolonialisme Eropa, sikap itu tak lebih sebagai suatu retorika. Kemudian, secara pribadi keluarga Roosevelt memiliki pertalian leluhur dengan Belanda. Bahkan, Franklin D. Roosevelt bangga dengan pertalian itu, yang terutama tampak ketika keluarga kerajaan Belanda mengunjunginya.

Selanjutnya, persepsi AS terhadap Belanda yang dianggap sebagai bangsa yang memiliki demokrasi cinta damai, walaupun banyak kalangan AS yang tidak mengetahui tentang Perang Aceh dan Belanda turut melatarbelakangi simpati itu. Pengaruh Belanda terhadap sejumlah pejabat di Departemen Luar Negeri (Deparlu) AS pun kian menampakkan keberpihakan itu. William S.B. Lacy, Asisten Kepala Bagian Masalah Asia Tenggara Deparlu AS, sempat mendapat julukan "*darling of the Netherlands embassy*." Sementara itu, di Hindia Belanda Konsul Jenderal AS, W.A. Foote terkesan dengan pengelolaan kolonial Belanda. Sikap membela Belanda kian berkembang berkaitan dengan PD II. Penolakan Belanda terhadap keinginan Jepang dalam perundingan yang berlangsung di tahun 1941 mendapat catatan khusus dari AS. H.J. van Mook mendapat tempat penghargaan sendiri dari AS.

AS mengharapakan suatu keberlangsungan kekuasaan Belanda di Indonesia. Harapan AS terhadap Belanda sangat besar terhadap

pembaruan menuju pemerintahan sendiri atau status dominion dan kemungkinan merdeka setelahnya. Kehadiran Belanda di Asia Tenggara juga dipandang lebih efektif dan menguntungkan untuk kestabilan kawasan itu dan kepentingan ekonomi AS. Untuk itu, ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama tahun 1947, AS tidak memperlihatkan sikap mencegah, namun seolah-olah memberi angin untuk penyelesaian segera atas persoalan itu. Berdasarkan itu pula Belanda merasa bahwa AS merestui penyelesaian seperti itu sehingga menghasilkan agresi berikutnya.

Akan tetapi, keadaan berubah, kawan seiring berpisah jalan. Proses perubahan sikap itulah yang dibahas pada bagian ini. Tentunya perubahan sikap itu tidaklah semata merupakan hasil proses internal kalangan penentu kebijakan AS, namun juga melibatkan peran aktif pihak RI. Sebenarnya juga perubahan itu memperlihatkan semacam suatu kegagalan pihak Belanda mempertahankan simpati AS terhadapnya. Akan tetapi, persoalan itu tidak diberi ruang khusus dalam pembahasan ini.

MASALAH INDONESIA

Setelah PD II dan Perang Pasifik berakhir, Sekutu menghadapi masalah mengenai pengaturan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pendudukan Jepang. Sekutu semula tidak mengira bahwa pengaturan itu akan menimbulkan persoalan. Dalam pandangan Sekutu, proses pengembalian wilayah itu akan berjalan tanpa banyak kesulitan. Akan tetapi, ternyata jangka waktu pendudukan yang relatif singkat telah mengubah keadaan. Di bawah pengendalian militer Jepang, gerakan nasional setempat berkembang sedemikian rupa, menguat menuju kepada suatu perwujudan cita-cita kemerdekaan. Pada awal invasinya Jepang senantiasa mendengarkan kedatangannya sebagai pembebas Asia.

Di Indonesia propaganda Jepang dalam menggalang dukungan untuk tujuan perang disambut dengan cara dan sikap tersendiri oleh pemimpin gerakan nasional. Propaganda Jepang tidak mengalihkan, apalagi menyurutkan, perjuangan menuju kemerdekaan sendiri. Kehadiran kekuatan Jepang dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menggalang dan mengerahkan dukungan rakyat walaupun dalam lingkup pengawasan Jepang, demi cita-cita yang telah diperjuangkan sejak masa kolonial Hindia Belanda. Peranan kepemimpinan nasional semakin menemukan bentuknya dan menguat. Rakyat Indonesia memperoleh pilihan siapa yang mampu memimpin mereka.

Kedaaan di Indonesia berkembang sedemikian rupa di saat kemenangan akhir Sekutu. Kevakuman otoritas dimanfaatkan untuk mengumandangkan kemerdekaan. Ketika pasukan Inggris yang mengemban tugas menyelenggarakan peralihan dari tentara Jepang, mereka menemukan suatu pemerintahan negara yang merdeka. Pengaturan tentara Jepang di Indonesia dilaksanakan oleh Inggris setelah AS menyatakan bukan berada di bawah yurisdiksinya. Kemudian, Inggris banyak berperan dalam menjembatani pertemuan antara kedua belah pihak

yang bertikai, Indonesia dan Belanda. AS dalam beberapa hal memperlihatkan keyakinannya terhadap peran penengah Inggris.

Namun, persoalan itu tetap dicermati oleh AS yang memandangnya dalam strategi jangka panjangnya. Tak beberapa lama, AS menghadapi dilema antara membela kepentingan mitra negaranya (sekutu) atau menegakan idealisme anti kolonialismenya yang sempat didengungkan semasa menghadapi Jepang. Pada awalnya dilema itu tidak memojokkan kepentingan AS, namun perkembangan di Eropa yang berada di bawah bayang-bayang invasi Uni Sovyet—sekutunya pula dalam menghadapi Jerman di Eropa—mendorong dengan cepat tindakan dan keberpihakan yang harus dipilih. Ancaman komunisme di Eropa menjadikan AS memberi pilihan kepada Belanda. Akan tetapi, perkembangan komunisme yang cepat ke Asia dan pembelaan Sovyet terhadap masalah Indonesia di PBB membuat Ukraina mengangkat masalah Indonesia pertama kali ke forum PBB (Suwarno 1999). Kelak dukungan itu menjadi salah satu faktor yang mendorong pendulum sikap AS ke tengah, menjauhi Belanda, dan seterusnya ke pihak Indonesia.

Pada beberapa sumber dikatakan bahwa AS masih berdiri di tengah-tengah, yang tampak pada sikapnya terhadap Indonesia sebagaimana dinyatakan Suwarno (1999) sebagai berikut.

AS tidak mendukung usaha Belanda untuk mengembalikan pemerintahannya di Indonesia, juga tidak (mendukung) kaum nasionalis Indonesia. Selain itu dalam pernyataan resmi AS tidak menyatakan bahwa pimpinan kaum nasionalis sebagai boneka atau kolaborator, atau menyatakan gerakan kemerdekaan (Indonesia) diilhami oleh Jepang, dan juga tidak menyatakan gerakan nasionalis Indonesia sebagai "Republik Indonesia.

Sikap seperti itu berkaitan dengan pernyataan dari C. Hull yang tercantum dalam Surat Dubes Belanda di Washington Loudon kepada Kementearian Luar Negeri di Den Haag pada tanggal 21 Oktober 1945.

Dalam pernyataan Menlu Hull (AS) tanggal 21 Maret 1944 dengan judul "Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat", terdapat paragraf mengenai "rakyat" yang belum merdeka sebagai berikut, "pada pundak bangsa-bangsa yang telah merdeka terletak beban dan tanggung jawab sehubungan adanya keinginan rakyat-rakyat yang belum merdeka menyangkut berkeinginan untuk merdeka. Menjadi kewajiban bangsa-bangsa yang mempunyai hubungan politik dengan rakyat tersebut untuk membantunya membangun materil maupun dengan pendidikan guna mempersiapkan mereka agar dapat memikul kewajiban dan tanggung jawab pemerintahan sendiri dan untuk mendapatkan kemerdekaan. Inilah politik AS."

Kemudian Dokumen Departemen Luar Negeri AS tahun 1945 dan 1946 menegaskan kembali keyakinan Amerika akan hak semua bangsa untuk merdeka, namun pada saat yang bersamaan berpandangan bahwa sebagian besar penduduk bumiputera akan menyambut kembalinya kekuasaan Belanda. Di balik pandangan dan persepsi AS tentang daerah jajahan Belanda itu di masa mendatang terselip harapan akan kebebasan modal AS untuk ditanamkan dalam bidang perdagangan dan industri di

masa mendatang. Namun, pandangan AS itu tidak menyenangkan Belanda yang mencurigai "rencana" masa depan menurut versi AS itu (Homan 1980). AS pun tidak memiliki niat ataupun rencana untuk terlibat langsung dalam mengatasi perselisihan Indonesia dan Belanda. AS masih mengakui Belanda sebagai pemegang kedaulatan atas Indonesia. Cara damai adalah pandangan AS terhadap pemecahan persoalan itu (Oey 1981).

Roosevelt yang berjanji akan mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda berhadapan dengan sikap militer dan juga publik AS yang menolak mendukung suatu kekuatan kolonial. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Jenderal McArthur berkeinginan untuk melibatkan militer AS dalam menguasai kembali Hindia Belanda, tetapi tidak mendapat dukungan dari Roosevelt dan Jenderal Marshall sehingga terbatas hanya di Filipina. Penguasaan daerah Irian Jaya (Papua) berkaitan dengan arti strategis itu. Bantuan AS terhadap Belanda (disetujui pada bulan September 1944) untuk melatih dan melengkapi 7000 personel brigade marinir Belanda, namun belum rampung seluruhnya sampai Agustus 1945 (Homan 1980).

Ketika AS masih berpaling ke Eropa, sejalan dengan desakan biro urusan Eropa pada Kementerian Luar Negeri dan juga berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1945 (Panitia Penulisan Sejarah Deplu 1971), tidaklah serta-merta bantuan langsung lainnya diberikan. Upaya Belanda untuk memanfaatkan sisa persenjataan militer AS di salah satu bagian Indonesia yang masih tertinggal tidaklah dipenuhi oleh AS. Bantuan AS diberikan untuk perlengkapan di luar persenjataan tempur. Mengenai penolakan bantuan itu tampak pada catatan Suwarno (1999) sebagai berikut.

Mengetahui sikap Belanda yang berusaha keras untuk memperoleh kembali Hindia-Belanda, AS bersikap tegas, tidak akan membantu Belanda dalam upayanya itu. Bahkan sisa *supply* persenjataan (dari PD II) yang tertinggal di Hollandia (kini Jayapura) yang cukup untuk mempersenjatai kurang lebih 30.000 tentara, AS menolak barang-barang itu dibeli Belanda, AS menduga bahwa persenjataan tersebut akan dipergunakan Belanda untuk mengembalikan Hindia Belanda dengan cara kekerasan. Upaya Belanda untuk bisa memiliki sisa persenjataan di Hollandia dilakukan melalui banyak saluran, melalui Markas Besar Jenderal MacArthur di Manila, melalui Kastaf Gabungan tentara AS, juga memerintahkan Duta Besarnya untuk melakukan demarch ke Kementerian Luar Negeri di Washington, tetapi jawaban AS tegas, tidak mengijinkan Belanda untuk membeli sisa persenjataan mereka yang tertinggal di Irian Jaya (Jenderal Mac Arthur pernah bemarkas di Irian Jaya pada masa PD II).

Surat yang mengandung keterangan tentang upaya membeli senjata AS di Irian Jaya adalah Kawat Pemerintah Hindia-Belanda kepada Duta Besar Belanda di Washington Loudon pada tanggal 23 Oktober 1945; Surat Dubes Belanda di Washington Loudon kepada Menteri Luar Negeri Van Kleffens tanggal 23 Oktober 1945; Kawat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook kepada Menteri Seberang Lautan Logemann pada tanggal 24 Oktober 1945 (Suwarno 1999).

Pada tulisan Gardner (1999) tampak simpati mulai muncul bersamaan dengan rasa terperangah melihat digunakannya semboyan kemerdekaan AS pada grafiti ketika mereka merapat di pelabuhan Batavia. Kesan awal itu memang tidak langsung berkembang, namun sentimen antikolonial secara tidak langsung mengentakkan simpati kepada rekan sejalannya dalam masa perang. Namun, semuanya itu tidaklah langsung muncul, melainkan melalui sejumlah tahap. Yang tak kurang pentingnya, sebagaimana pihak Belanda, pihak Republik berupaya untuk menarik perhatian dan dukungan AS dalam perjuangannya.

GAYUNG BERSAMPUT: MENARIK ULURAN PAMAN SAM

Indonesia telah sejak awal menyadari bahwa potensi yang ada harus dikerahkan. Berkaitan dengan itu, segala kendala harus ditekan sekecil mungkin agar tidak menghambat jalannya perjuangan. Peralihan bentuk pemerintahan dari presidensial ke parlementer, setelah pembentukan kabinet *Bucho* (menurut Ben Anderson) yang singkat hidupnya, merupakan antisipasi kedatangan pasukan Sekutu yang melakukan pengambilalihan. Namun, sering dikatakan bahwa Sjahrir lah yang mengambilalih kekuasaan melalui suatu kudeta diam-diam (*silent coup*). Di sisi lain, penundaan kedatangan pasukan Sekutu, yang dikatakan merupakan kebijakan AS, merupakan suatu "rahmat yang tersembunyi" sehingga Indonesia sempat memproklamkan kemerdekaannya dalam suasana *status quo* (kevakuman) kekuasaan. Kedatangan pasukan Belanda yang membongceng pasukan Sekutu, yakni memanfaatkan bantuan seragam AS, mendapat protes dari Soekarno, yang sekaligus memanfaatkan situasi itu untuk menarik perhatian AS. Soekarno mengirim protes yang bertajuk "Pesan-Dakwaan kepada Presiden Truman dan Perdana Menteri Atlee" mengenai tentara Belanda yang memakai seragam tentara AS sehingga sulit untuk dibedakan dengan tentara Sekutu (istilahnya *Serikat*) (Toer *et al* 1999). Memang serdadu Belanda banyak yang terang-terangan memakai atribut AS dan membuktikan bahwa mereka mendapat bantuan dari Negeri Paman Sam (Kahin dan Kahin 1997).

Sjahrir pun mengirimkan kawat kepada Presiden Truman yang berisikan sebagai berikut.

Pernyataan State Department terakhir yang berisi good will dan dorongan menambah semangat kami dan sangat melegakan kami di dalam perjuangan kami untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan dan demokrasi di Indonesia. Saya menganggap Tuan sebagai kepala pemerintah dari suatu negara yang senantiasa sebagai pendekar perjuangan untuk penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan keadilan, dan mengharapkan sudilah Tuan mempergunakan pengaruh Tuan untuk menanggulangi pertumpahan daerah di Indonesia" (Ida 1985).

Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 1946 berlangsung percakapan pribadi antara Sjahrir dan Konsul Jenderal AS di Jakarta (Batavia), Walter A. Foote. Pada kesempatan itu, Sjahrir mengeluhkan ketidaksetujuannya terhadap usulan Belanda, tertanggal 10 Februari 1946, setelah beberapa perundingan yang diperantarai oleh Inggris. Kemudian, dalam laporannya

Foote menulis bahwa Sjahrir, "*may also hope that the USA in defence of its trade and industries may bring some pressure on the Dutch*" (Oey 1981). Pada pembicaraan berikutnya pada tanggal 8 Maret 1946, Sjahrir meminta pendapat Foote tentang sikap AS terhadap usulan itu dan juga komentar pendapat umum AS.

Bentuk lainnya di tempat yang berbeda dan beberapa waktu sebelumnya adalah pada bulan April 1940, yang diulang pada tahun 1944, yaitu Pemuda Indonesia (Indonesia Muda) di Kairo meminta bantuan Presiden Roosevelt untuk membujuk pemerintah Belanda agar memberikan kemerdekaan kepada negeri mereka. Kemudian di masa perang, sejumlah kelompok nasionalis Indonesia dibentuk di AS, terutama Komite Kemerdekaan Bersatu untuk Pembentukan Persemakmuran Indonesia dan Belanda serta Perhimpunan Indonesia di San Fransisco dan Klub Indonesia Amerika di New York. Kedua organisasi terakhir menuntut kemerdekaan segera dan mengirimkan suatu permintaan kepada Konferensi PBB di San Fransisco pada tahun 1945 (Homan 1980).

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT

Telah dikemukakan bahwa pada awalnya AS berseberangan dengan perjuangan Indonesia. Indonesia banyak mendapat tekanan dari pihak AS dalam perundingan dengan Belanda. Tekanan yang jelas adalah pada saat pemerintah AS pada tanggal 28 Juni 1947 menyampaikan suatu Aide Memoire kepada pemerintah RI yang menyerukan agar segera diadakan kerja sama dengan Belanda untuk membentuk suatu pemerintahan peralihan bagi seluruh wilayah Indonesia. Dalam Aide Memoire itu dinyatakan juga: "*The Linggajati Agreement specifies an interim period from now until Januari 1, 1949, during which the Netherlands is to retain sovereignty and ultimate authority in Indonesia.*" Mengingat bahwa pasal tersebut tidak terdapat di dalam persetujuan itu, timbul kesan kuat bahwa hal itu sesungguhnya adalah tuntutan baru dari pihak Belanda yang disampaikan kepada RI melalui AS. Dalam hubungan ini AS secara langsung atau tidak langsung telah melakukan tekanan terhadap RI (Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri 1971).

Tekanan lainnya adalah pada saat penerimaan ketentuan dari Perjanjian Renville. Nasution (jil. 6 1978) mengatakan bahwa RI mengalah di bawah tekanan ancaman agresi, di bawah tekanan KTN khususnya wakil Amerika. Kesan serupa juga diberikan oleh Reid (1996). Sementara Jones (1971) tidak memberikan keterangan mengenai tekanan Graham kepada pihak Indonesia dengan usulan tambahan namun menyebutkan "... *Nevertheless the Renville meetings had saved Indonesia, for without it, as Dr Graham told me later, the Indonesian freedom fighters would have been reduced to guerilla warfare in the jungles.*" Padahal, pada saatnya kekuatan gerilya justru meyakinkan seorang Menteri Luar Negeri Marshall bahwa Belanda tidak dapat memperoleh kemenangan dan juga akan menghadapi perang yang berkepanjangan (Gardner 1999; Anwar 1997).

Tekanan berikutnya timbul pada saat perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Catatan Ida (1983): "Intervensi AS dalam perundingan itu tampak pada komisi untuk Urusan Keuangan dan Ekonomi yang terdiri atas 4 subkomisi. Pada saat pembicaraan soal utang terjadi kemacetan sehingga dibentuk suatu komisi *ad hoc* supaya keluar dari suasana konperensi maka rapat komisi *ad hoc* diadakan di Baarn tanggal 2 Oktober 1949, di mana anggota dari Amerika, Cochran sangat giat menemukan suatu cara agar mereka dapat menerobos kemacetan itu." Pernyataan Kahin dan Kahin (1997) bahwa "dalam KMB di Den Haag, November dan Desember 1949, wakil AS, Merle Cochran yang bertindak sebagai moderator, memihak Belanda dengan menuntut dua hal dari Indonesia. Mengingat AS masih prihatin dengan keadaan perekonomian Belanda, Cochran memaksa agar Republik menanggung utang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar Amerika. Sekitar 70 persen dari jumlah itu adalah utang pemerintah kolonial, yang menurut pihak Indonesia 42 persen merupakan biaya operasi militer dalam menghadapi Republik. Mengingat mereka telah setuju agar semua investasi Belanda dan pihak asing lainnya di Indonesia akan dilindungi, persyaratan tersebut dilihat oleh semua pihak di Indonesia sangat tidak adil. Jaminan pribadi yang diberikan Cochran kepada Indonesia bahwa mereka akan mendapat bantuan yang cukup besar dari AS untuk melunasi beban utang tersebut terbukti kosong belaka ketika ternyata yang diberikan hanya 100 juta dolar Amerika dalam bentuk kredit ekspor-impor yang harus dibayarkan kembali." Demikian pula dalam hal kesepakatan tentang Irian Barat (Jaya) yang dipaksakan oleh pihak AS. Tindakan Cochran mendapat dukungan penuh dari Truman di Washington.

Di balik tekanan-tekanan itu terselip sebuah perubahan sikap AS terhadap masalah Indonesia. Di antara faktor-faktor pendukung simpati AS sebelum PD II, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa peristiwa yang memperlihatkan perbedaan atau perselisihannya dengan Belanda. Beberapa masalah yang mengganggu hubungan AS dan Belanda sebelum perang adalah blokade Sekutu dalam Perang Dunia I (PD I), konsikasi pelayaran Belanda tahun 1918, perselisihan mengenai penanaman modal AS di bidang perminyakan di Hindia Belanda, dan perselisihan mengenai kepulauan Palmas atau Miangas di perbatasan Hindia Belanda dan Filipina (Homan 1980).

Akan tetapi, penyebab perubahan kebijakan AS yang paling penting adalah kekecewaan AS terhadap rencana dekolonisasi Belanda. Sampai pertengahan tahun 1948 AS menyimpulkan bahwa, salah atau benar, rencana Belanda untuk memerdekakan Indonesia dipertanyakan. Departur merasa bahwa Belanda telah mengecoh Washington. Sementara itu, perubahan juga melanda pejabat-pejabat Departur AS.

Coert Dubois, wakil AS yang baru di Komisi Tiga Negara yang sejak bulan Oktober 1947 mencoba membantu Belanda dan Indonesia agar mencapai kesepakatan mengenai hubungan di masa yang akan datang, beserta anggota-anggota stafnya membujuk Departur untuk mengubah arah kebijakannya. Perlahan-lahan Dubois, yang semula memihak Belanda, pada

musim panas tahun 1948 berubah mempertanyakan ketulusan rencana Belanda itu.

Penggantinya, H. Merle Cochran, diplomat AS pertama yang cakap membantu menengahi perselisihan, segera mencapai kesimpulan yang sama. Pejabat kunci lainnya dalam mengubah kebijakan AS adalah Dean Rusk, Direktur Kantor Masalah Politik Khusus, bagian Departu yang mengawasi semua persoalan PBB. Tidak seperti atasannya, Menlu Dean Acheson yang tidak peduli terhadap aspirasi Dunia Ketiga, Rusk peka terhadap kolonialisme. Lebih jauh ia berkepentingan agar PBB memainkan peranan penting dalam persoalan dunia. Rusk dan lain-lainlah, seperti Duta Besar AS Philip Jessup, yang menetralisasi dan menyingkirkan para Eropanis, termasuk Acheson, di Departu.

Kemudian pada tingkatan tertentu, pendapat umum memainkan peranan penting dalam mengubah kebijakan Washington. Memang kebanyakan orang Amerika umumnya tidak peduli dengan masalah itu sebagaimana terhadap masalah kebijakan luar negeri lainnya. Banyak surat kabar yang kritis terhadap Agresi Militer II, namun sebagian kecil yang mendukung. Di antara yang sangat kritis adalah koran *Chicago Tribune*, biang konservatif, yang menyarankan Ratu Juliana, kabinetnya dan banyak pejabat Belanda agar diadili sebagai penjahat perang (Homan 1997).

Kemudian tak ada dukungan dari Kongres yang berarti untuk Belanda. Senat menuntut suatu penyelesaian segera dan muncul seruan beberapa senator yang dipimpin oleh Ralph Owen Brewster dari Maine, seseorang yang integritasnya diragukan. Brewster membandingkan Agresi Militer II sebagai "serangan konyol Jepang atas Pearl Harbour dan serbuan invasi Nazi Jerman terhadap Belanda". Serangan Brewster diilhami oleh faktor politik dan dimotivasi oleh faktor ekonomi. Serangan oleh kelompok liberal seperti William Langer dan Wayne Morse lebih penting. Namun, tak ada dukungan penuh terhadap Belanda. Di Majelis Rendah dua anggota Kongres mendukung Belanda: Paul Shafer dari Michigan yang mewakili pendukung keturunan Belanda dan Ricard Thurmond Chattam dari Carolina Utara, seorang veteran Angkatan Laut pada PD II dan penerima Bintang Oranye Nassau atas keberanian dalam pertempuran Pasifik. Namun, akhirnya reaksi Kongres tidak menentukan walaupun Departu membuat kebijakan dan menggunakan sentimen Kongres sebagai alasan untuk melakukan apa yang diinginkan.

Perubahan di Washington bertemu dengan kenyataan bahwa Indonesia mampu membuktikan ketegarannya untuk merdeka. Di tengah-tengah konsentrasi terhadap serangan militer dan blokade Belanda, Indonesia masih mampu mengatasi suatu pemberontakan komunis. Keberhasilan itu menjadi masukan dan pertimbangan tersendiri bagi kalangan elite politik AS yang ketika itu sedang memulai suatu perang yang baru, Perang Dingin. Juga citra perjuangan kemerdekaan Indonesia kemudian meningkat ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II di tengah-tengah hadirnya pengamat asing, di antaranya dari AS. Dengan ancaman penarikan bantuan Marshall Plan, AS memaksa Belanda untuk melakukan perundingan yang menjadi

babak akhir dari perselisihannya dengan Indonesia (Van der Eng 1988). Konferensi Meja Bundar (KMB) mengakhiri perselisihan itu. Dapat ditambahkan pandangan Edward Masters (2003) yang menulis, "*.....Faced with Dutch 'police actions', which undercut UN-sponsored negotiations, the Truman administration informed the Dutch that 'in the absence of Indonesian settlement there was no chance whatever of Congress authorizing funds' for support to the Neetherlands. This turned the trick, and the ensuing negotiations led to Indonesia's independence.*"

Menlu AS, dalam pidato menyambut hasil KMB, menyebutkan beberapa hal tentang perjuangan Indonesia, selain perasaan puas terhadap hasil-hasilnya. Antara lain disampaikan bahwa "dengan tindakannya yang gagah berani melawan gerakan subversif Komunis bulan September yang lalu, Republik Indonesia sudah menunjukkan ciri nasionalisnya yang sejati" dan "sumbangan Amerika Serikat kepada penyelesaian masalah Indonesia dilakukan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai anggota Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia." Juga suatu janji AS untuk RI (Serikat) di masa setelah itu, "Republik Indonesia Serikat yang baru akan menghadapi tugas besar dan harus memikul tanggung jawab yang berat. Ia dapat mengharap simpati dan dukungan semua pihak yang percaya kepada demokrasi dan hak untuk memerintah sendiri. Di pihaknya, pemerintah Amerika Serikat sedang terlibat dalam penyelidikan tentang jalan dan cara bagaimana akan dapat membantu, sekiranya bantuan demikian diminta." Lalu sebuah pujian dan dukungan lainnya, "Dengan riwayat nasionalisme mereka yang sejati, rakyat Indonesia diharapkan dengan berhasil akan menentang segala usaha dari kediktatoran asing yang agresif untuk menghancurkan kemerdekaan mereka yang baru saja diperoleh dengan perjuangan" (Bradley dan Lubis 1991).

CATATAN AKHIR

George McTurnan Kahin turut menyaksikan peristiwa Agresi Militer Kedua Belanda terjadi. Di dalam karya Rosihan Anwar (1997) tercatat beberapa orang Amerika yang berada di Indonesia ketika Revolusi Kemerdekaan berkecamuk, kebanyakan adalah para kuli tinta. Kemudian Gardner menceritakan bahwa orang-orang Amerika yang bertugas di Indonesia saat Revolusi umumnya adalah para prajurit. Tidak patut dilupakan pula pilot Amerika yang menerbangkan pesawat udara pertama milik Republik yang ditembak jatuh oleh Belanda sempat hilang dan baru ditemukan beberapa dekade lalu dan Walter Foote beserta diplomat Amerika Serikat (AS) yang berperan dalam perundingan antara kedua pihak yang sedang bertikai.

Gambaran tersebut menyangkut siapa-siapa yang terkait dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari pertimbangan politik, peran dan pengaruh mereka terhadap pembentukan kebijakan AS terhadap masalah Indonesia tidaklah sama satu dengan lainnya, bahkan ada yang dipandang tidak memberikan sumbangsih apa pun dalam bidang itu. Akan tetapi, kehadiran mereka sebenarnya sudah membentuk citra

tersendiri dan memantulkan sikap masyarakat AS dalam derajat tertentu. Memang perhatian lebih banyak diberikan kepada tokoh-tokoh yang menonjol keterlibatannya dalam perjuangan politik Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Tak pelak lagi dari sudut pandang semacam itu, sejarah adalah jejak kaki orang besar (*great men history*).

Peralihan sikap politik AS terhadap persoalan Indonesia dan intervensinya tidak lepas dari struktur dan mekanisme resmi dalam menentukan dan mengambil keputusan di bidang politik luar negerinya. Susunan pemerintahan AS menempatkan alur kebijakan luar negeri yang melibatkan Gedung Putih (Presiden), Menteri Luar Negeri, pejabat-pejabat di Departemen, dan lain-lain (Homan 1997). Kemudian dapat dilanjutkan bahwa di daerah konflik pejabat yang berwenang adalah seorang Konsul Jenderal. Pejabat itu terkadang mewakili langsung pemerintah AS dalam komisi atau komite yang dibentuk oleh PBB, terkadang mendampingi utusan AS dalam bentukan itu, seperti F. Graham dari Komisi Tiga Negara (Komisi Jasa Baik atau *Good Office Committee*).

Secara formal, alur birokrasi seperti itu, secara timbal balik, merupakan sarana pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan luar negeri AS. Akan tetapi, dalam kenyataannya apakah demikian yang terjadi? Jawabannya tidak dapat dipastikan. Misalnya, apakah persoalan Indonesia mendapat perhatian saksama dari Gedung Putih karena sejumlah sumber menyebutkan nama Harry Truman, Presiden AS pada masa itu, atau apakah terjadi delegasi wewenang kepada pejabat di bawahnya adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dicarikan jawabannya. Walaupun memoar, biografi, dan kumpulan dokumen masa pemerintahan Presiden Truman telah dilansir, tidak ditemukan suatu dukungan terhadap dugaan dalam bentuk pertanyaan tersebut. Suatu penelusuran dan penelitian lebih mendalam perlu dilakukan untuk menyibak ketidakjelasan itu.

Demikianlah di akhir tulisan ini sejumlah pertanyaan belum tuntas dijawab; sementara pertanyaan baru muncul. Dalam sejumlah karya diungkapkan adanya peran aktif publik AS, walaupun relatif dalam skala tidak besar, untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintahnya terhadap masalah Indonesia. Berbagai organisasi simpatisan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dibentuk dan bersama-sama wakil pemerintah berjuang membalas agitasi politis pihak Belanda di AS (Gardner 1999). Tentunya, persoalan ini, apabila diangkat dalam sebuah tulisan, akan memberikan sumbangsih yang sangat besar untuk menelusuri sejarah hubungan Indonesia dan AS. Selama ini tema-tema yang berkembang dalam lingkup bidang studi itu mengambil kancah peristiwa-peristiwa mengenai atau di Indonesia. Gardner juga (1999) yang mengemukakan bahwa Indonesia pernah menawarkan jasa baiknya untuk menyelesaikan masalah Vietnam.

Perkembangan perhatian terhadap pembahasan tentang hubungan Indonesia dan AS memperlihatkan keadaan yang menggembirakan seiring diterbitkannya sejumlah karya dalam tema yang beragam. Berdasarkan

suatu penelitian bibliografi pada tahun 2000 tampak bahwa jumlah pustaka yang berhubungan dengan pokok bahasan itu tak kurang dari 161 karya yang diterbitkan dan kini tentunya jumlah itu telah bertambah. Tema karya-karya itu tersebar dalam berbagai bidang dan lingkup pembicaraan, mulai dari umum, politik hingga budaya (Tangkilisan 2001). Tampaklah bahwa dalam perkembangan itu seyogianya perspektif Indonesiasentris tetap dibutuhkan untuk mengimbangi sudut pandang yang sewajarnya pasti berbeda sehubungan dengan perbedaan budaya dan kepentingan.

DAFTAR ACUAN

- Anwar, Rosihan (1997), *Singa dan Banteng Sejarah Hubungan Belanda – Indonesia 1945 – 1950*. Jakarta: UI Press.
- Aspek-aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949 (1997). Jakarta: Bagian Pers dan Kebudayaan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia.
- Curaming, Rommel (2003), "Towards Reinventing Indonesian Nationalist Historiography" dalam *Kyoto Review of Southeast Asia*, 3, March.
- Van der Eng Pierre (1988), "Marshall Aid as a Catalyst in the Decolonization of Indonesia, 1947 – 49" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*. Vol. XIX, no. 2, September.
- Gardner, Paul F (1999), *50 Tahun Hubungan Amerika Serikat-Indonesia: Bersama dalam Harapan, Sendirian dalam Kecemasan* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gottschalk, L. (1975), *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Gouda, Frances dan Thijs Brocades Zaalberg (2002), *American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia US Foreign Policy and Indonesian Nationalism*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Gould, James W. (1972), "American Imperialism in Southeast Asia Before 1898". *Journal of Southeast Asian Studies*. Vol. 3, 2.
- Hadisoewito, Irna H.N. (1993), *Chairul Saleh Tokoh Kontroversial*. Jakarta: Mutiara Rakhmat.
- Hasan, M. Zein (1980), *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (Perjuangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Homan, G.D. (1980), "The United States and the Indonesian Question, December 1941 – December 1946" dalam *Tijdschrift voor Geschiedenis*, 93.
- — — — —. (1997), "The United States, the Netherlands and the Struggle for Independence" dalam Drooglever P.J, M.J.B. Schouten (eds). *De Leeuw en de Banteng*. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
- Ida, Anak Agung Gde Agung (1983), *Renville* (terjemahan). Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- — — — —. (1994), *Pernyataan Rum – Van Roijen 7 Mei 1949*. Yogyakarta, Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press.
- — — — —. (1994), *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta, Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press.
- Jones, H.P. (1971), *Indonesia The Possible Dream*. Singapore: Ayu Mas PTE, LTD.
- Kahin, George Mc Turnan (1952), *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Kahin, G. Mc T. dan Audrey Kahin (1997), *Subversi sebagai Politik Luar Negeri Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia* (terjemahan) Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kennedy, Paul. (1989), *The Rise and Fall of the Great Powers Economic Change and Military Conflict*. New York: Vintage Books.
- Lapian, A.B. dan P.J. Drooglever (ed) (1992), *Menelusuri jalur Linggarjati: Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Masters, Edward (2003), "The Ups and Downs of US-Indonesia Relations" dalam Nguyen Thang D dan Frank-Jurgen Richter (eds.). *Indonesia Matters Diversity, Unity and Stability in Fragile Times*. Singapore: Times Edition.

- McMahon, R.J. (1981), *Colonialism and Cold War The United States and the Struggle for Indonesian Independence 1945 – 1949*. Ithaca/London.
- Nasution, A.H. (1978), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 6 *Perang Gerilya*. Semester I. Bandung: Disjarah AD dan Penerbit Angkasa.
- Oey, Hong Lee (1981), *War and Diplomacy in Indonesia 1945 – 50*. Townsville: James Cook University of North Queensland.
- Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri (1971), *25 Tahun Departemen Luar Negeri 1945 – 1970*. Jakarta: Jajasan Kesedjahteraan Karjawan Deplu.
- Reid, Anthony J.S. (1996), *Revolusi Nasional Indonesia* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sabir, M.M. (1987), *Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: C.V. Masagung.
- Siregar, M.R. (2000), *Menentukan Nasib Sendiri versus Imperialisme*. Medan: Sumatera Human Rights Watch Network.
- Suwarno, Basuki (1999), *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945 – 1950*. Jakarta: TP.
- (1999), *Hubungan Indonesia – Belanda Periode 1945 – 1950*. Jilid II. Jakarta: Setro Acnees.
- Tangkilisan, Yuda B. (2001), “Bibliografi Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat” dalam *Makara: Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Desember.
- (2002), *Rajawali Amerika Terbang Masuk: Studi Awal Meninjau Kembali Latar Belakang Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perjuangan Republik Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan 1945 – 1949*. Laporan Seminar Hasil Penelitian II/2001 – 2002. Depok: Pusat Pengembangan Penelitian FIB UI.
- Toer, Pramoedya Ananta; Koesalah Toer; Ediati Kamil (1999), *Kronik Revolusi Indonesia Bagian I (1945)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.